

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari amanah dan mandat yang diberikan pada suatu Satuan Kerja dalam hal ini BPK Perwakilan Provinsi Jambi dan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2021. LAKIN adalah bentuk penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Strategis tahun 2021. LAKIN selain merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, juga sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi menuju terwujudnya organisasi yang akuntabel, transparan dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Jambi merupakan salah satu Satuan Kerja BPK yang berada di bawah Auditorat Keuangan Negara V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V. BPK Perwakilan Provinsi Jambi mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi, kota/kabupaten di Provinsi Jambi, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Berdasarkan data bezetting per 31 Desember 2021, BPK Perwakilan Provinsi Jambi memiliki jumlah pegawai sebanyak 116 orang, yang terdiri dari 9 orang Pejabat Struktural, 65 orang Pejabat Fungsional Pemeriksa, 1 orang Pejabat Pranata Humas Ahli Pertama, 22 orang Pejabat Pelaksana pada Sekretariat Perwakilan, dan 19 orang Pegawai Tidak Tetap. Alokasi anggaran yang dikelola dalam tahun anggaran 2021 sebesar Rp20.730.288.000,00 sedangkan target dan sasaran kinerja satuan kerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2021 yang berisikan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja.

## INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2021

Sasaran Kegiatan, Sasaran	Indikator Kinerja		Target
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas</li> <li>• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan</li> </ul>	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagian besar tercapai dengan baik. Dari 13 IKU, sebanyak 10 IKU berstatus hijau dan 3 IKU berstatus kuning serta tidak terdapat capaian target IKU yang berstatus merah. Sedangkan dalam rangka membiayai kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dari alokasi anggaran sebesar Rp20.730.288.000,00 (pagu setelah revisi anggaran) dapat direalisasikan sebesar Rp20.467.508.730,00 atau 98,73%.

Secara rinci data target dan realisasi IKU BPK Perwakilan Provinsi Jambi tahun 2021 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021**

Sasaran Kegiatan / Sasaran	Indikator Kinerja		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Skor IKU
<p>Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas</li> <li>• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan</li> </ul>	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	93,85%	93,85
	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	70,20%	93,60
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,40%	100,40
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	101,80%	101,80
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,44%	100,44
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,42	88,40
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	A (87,94)	101,08
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	99,31%	103,45
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100,00
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3,81	100,26
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100
	IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,5%	90,49%	103,42

## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LAKIN) adalah media pertanggungjawaban Manajemen Satuan Kerja atas kinerja capaian target Indikator Kinerja Utama yang telah disepakati bersama oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi dan Tortama KN V sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan LAKIN 2021 disusun berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada tahun 2021 dari 13 Indikator Kinerja Utama, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah dapat mencapai target yang ditetapkan (status hijau) sebanyak 10 IKU, 3 IKU dengan status kuning, dan tidak terdapat indikator dengan status merah. Terhadap IKU yang belum mencapai target, BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan melakukan pembenahan terhadap hal-hal yang mempengaruhi capaian target untuk perbaikan di masa mendatang. Sedangkan capaian IKU yang telah sesuai target tidak terlepas dari kerjasama yang baik seluruh unsur pegawai baik Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Pemeriksa maupun Pegawai Penunjang dan Pendukung, serta bimbingan seluruh Pimpinan baik Badan maupun Auditorat Utama Keuangan Negara V.

Akhir kata semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan seluruh stakeholder BPK Perwakilan Provinsi Jambi, baik masyarakat maupun seluruh unsur Pimpinan atas amanah yang diberikan dan target kinerja yang telah ditetapkan, dan menjadi pendorong bagi pencapaian target kinerja di tahun mendatang.

Kepala Perwakilan  
BPK Perwakilan Provinsi Jambi



**Rio Tirta**

## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. PROFIL BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI.....	2
C. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI .....	3
D. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI .....	5
E. SUMBER DAYA .....	8
F. PERMASALAHAN UTAMA ( <i>STRATEGIC ISSUES</i> ).....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	13
A. RENCANA STRATEGIS .....	13
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 .....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	17
A. CAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI.....	17
A.1. INDIKATOR KINERJA .....	19
1. IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan .....	19
2. IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan.....	22
3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.....	23
4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional .....	26
5. IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan...	28
6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal .....	30
7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK .....	32
8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP.....	33
9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi .....	35
10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan.....	37
11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi .....	39

12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi .....	41
13. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran .....	42
A.2. INDIKATOR KINERJA KELUARAN .....	48
1. IKK 1. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP .....	48
2. IKK 2. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan Parpol..	49
3. IKK 3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK.....	50
4. IKK 4 Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat.....	50
5. IKK 5. Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP .....	51
6. IKK 6 Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas.....	51
7. IKK 7 Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan .....	52
8. IKK 8 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Ganti Kerugian Negara atau Daerah.....	53
9. IKK 9 Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Pendahuluan /Interim .....	53
10. IKK 10 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan ...	54
11. IKK 11 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan.....	55
12. IKK 12 Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor.....	55
13. IKK 13 Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi .....	56
14. IKK 14 Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran.....	56
15. IKK 15 Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan .....	56
16. IKK 16 Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	57
C. REALISASI ANGGARAN.....	58
D. KINERJA LAINNYA .....	62
BAB IV PENUTUP.....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	RKA dan Keluaran DIPA BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2021.....	9
Tabel 2.	Indikator dan Target Kinerja Tahun 2021.....	16
Tabel 3.	Realisasi Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2021.....	17
Tabel 4.	Perbandingan Skor Capaian Target IKU Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	18
Tabel 5.	Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 1 Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	21
Tabel 6.	Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 1 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra.....	21
Tabel 7.	Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 2 Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	22
Tabel 8.	Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 2 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra.....	23
Tabel 9.	Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 3 Tahun 2020 dan Tahun 2021....	24
Tabel 10.	Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 3 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra.....	24
Tabel 11.	Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 4 Tahun 2020 dan Tahun 2021....	27
Tabel 12.	Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 4 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra.....	28
Tabel 13.	Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 5 Tahun 2020 dan Tahun 2021....	29
Tabel 14.	Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 5 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra.....	29
Tabel 15.	Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 6 Tahun 2020 dan Tahun 2021....	31
Tabel 16.	Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 6 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra.....	31
Tabel 17.	Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 7 Tahun 2020 dan Tahun 2021....	32
Tabel 18.	Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 7 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra.....	32
Tabel 19.	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 Tahun 2016 s.d. 2021.....	34
Tabel 20.	Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 8 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra.....	35
Tabel 21.	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 Tahun 2016 s.d. 2021.....	36



Tabel 22.	Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 9 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra.....	36
Tabel 23.	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 10 Tahun 2018 s.d. 2021.....	38
Tabel 24.	Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 10 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra.....	39
Tabel 25.	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 11 Tahun 2021 dengan Tahun 2020.....	40
Tabel 26.	Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 10 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra.....	40
Tabel 27.	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 Tahun 2016 s.d. 2021.....	41
Tabel 28.	Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 12 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra.....	42
Tabel 29.	Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 Tahun 2016 s.d. 2021.....	43
Tabel 30.	Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 13 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra.....	44
Tabel 31.	Perbandingan Target dan Realisasi pada Indikator Kinerja Keluaran.....	45
Tabel 32.	Jenis keluaran, volume keluaran, dan realisasi anggaran RKA BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2021.....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Gedung Lama Kantor BPK Perwakilan Jambi (27 Agustus 2007 s.d. 26 September 2010) .....	2
Gambar 2.	Gedung Baru Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi (27 September 2010 s.d. Sekarang) .....	3
Gambar 3.	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jambi.....	8
Gambar 4.	Kegiatan Media Workshop dengan tema “Jenis-jenis pemeriksaan di BPK” .....	12
Gambar 5.	Peta Strategi Tortama KN V dan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.....	15
Gambar 6.	Pembukaan Forum TLRHP yang Dilaksanakan melalui <i>Video Conference</i> .....	25
Gambar 7.	Diskusi dengan Dinas Peternakan Kabupaten Sarolangun terkait Temuan Aset pada Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Sarolangun.....	25
Gambar 8.	Pemeriksaan Fisik Sarana dan Prasarana Praktik Siswa SMK pada Pemeriksaan Kinerja atas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Dunia Usaha dan Dunia Industri.....	27
Gambar 9.	Konfirmasi Petugas Pungut Retribusi Pelayanan Kebersihan pada Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.....	31
Gambar 10.	Pengarahan Kepala Perwakilan tentang Nilai Dasar BPK kepada Pemeriksa sebelum Melaksanakan Pemeriksaan .....	33
Gambar 11.	Aktivitas Berbagi Pengetahuan terkait Aplikasi JASMIN.....	37



# **BAB I PENDAHULUAN**

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2021**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

BPK Perwakilan Provinsi Jambi merupakan Satuan Kerja Perwakilan BPK setingkat eselon II di bawah Auditorat Keuangan Negara V yang bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V. Sebagai Satuan Kerja, Perwakilan BPK di daerah, BPK Perwakilan Provinsi Jambi mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi, kota dan kabupaten di Provinsi Jambi, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Dalam menjalankan tugas yang diemban, BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp20.730.288.000,00. Alokasi anggaran sebesar tersebut di atas digunakan untuk mencapai visi dan misi BPK sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2020 – 2024 melalui rangkaian target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai dan telah dituangkan dalam Pencapaian Kinerja 2021 yang telah disepakati.

Laporan Kinerja (LAKIN) disusun sebagai media pertanggungjawaban pencapaian target kinerja maupun pengelolaan anggaran, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi. LAKIN yang merupakan laporan berkala, disusun sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 286/K/X-XII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan 2016 – 2020 yang dituangkan dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 7/K/I-XVIII.2/12/2015 tanggal 28 Desember 2015.

## **B. PROFIL BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

BPK Perwakilan Provinsi sebelum menjadi suatu Satuan Kerja yang berdiri sendiri, sejak tanggal 17 Januari 2002 merupakan bagian dari BPK RI Perwakilan II Palembang yang meliputi lima provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung dengan membawahi 11 daerah di lingkungan Provinsi Jambi saat itu, yaitu satu pemerintah Provinsi, satu pemerintah kota, dan sembilan pemerintah Kabupaten. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdirilah Perwakilan BPK RI di Jambi dan diresmikan pada tanggal 27 Agustus 2007.



*Gambar 1. Gedung Lama Kantor BPK Perwakilan Jambi (27 Agustus 2007 s.d. 26 September 2010)*

Pada awal berdirinya, BPK Perwakilan Provinsi Jambi menggunakan gedung dengan status pinjam pakai Pemerintah Provinsi Jambi yang berlokasi di Jalan Lingkar Barat I Paal 10 No. 78 Jambi. Pada tanggal 27 September 2010, BPK Perwakilan Provinsi Jambi memiliki kantor sendiri berlokasi di Jalan Pangeran Hidayat KM 6,5 No. 65 Jambi. Peresmian kantor dilakukan oleh Ketua BPK saat itu Drs. Hadi Poernomo, Ak.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi merupakan Satuan Kerja Perwakilan BPK setingkat eselon II di bawah Auditorat Keuangan Negara V yang bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V. Sebagai Perwakilan BPK di daerah, BPK Perwakilan Provinsi Jambi mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi, kota dan kabupaten di Provinsi Jambi, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi membawahi 12 entitas pemerintah daerah, yang terdiri dari satu entitas pemerintah provinsi, dua entitas pemerintah kota dan sembilan entitas pemerintah kabupaten, yang terbagi menjadi dua wilayah kerja yaitu :

1. Subauditorat Jambi I yang terdiri dari wilayah Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batang Hari.
2. Subauditorat Jambi II yang terdiri dari wilayah Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



*Gambar 2. Gedung Baru Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi (27 September 2010 s.d. Sekarang)*

### **C. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jambi berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
3. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
4. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;

5. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
6. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
7. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
8. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
9. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
12. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
13. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;

18. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
19. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi; dan
20. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

*Output* yang dihasilkan BPK Perwakilan Provinsi Jambi tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan (Stakeholder) baik internal maupun eksternal.

1. Pihak Internal terdiri dari:

- a. Anggota V;
- b. Sekretaris Jenderal;
- c. Inspektorat Utama;
- d. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- e. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara; dan
- f. AKN I s.d. AKN VII

2. Pihak eksternal terdiri dari:

- a. Unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari 12 entitas dengan satu Pemerintah Provinsi, dua Kota dan 9 Kabupaten, meliputi Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Unsur DPRD yang terdiri dari satu DPRD Provinsi, dua DPRD Kota dan sembilan DPRD Kabupaten;
- c. Unsur Penegak Hukum yang terdiri dari Kepolisian, Pengadilan dan Kejaksaan;
- d. Unsur BUMD;
- e. Unsur Media Massa Cetak dan Elektronik;
- f. Unsur Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di wilayah Provinsi Jambi.

#### **D. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan



BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jambi, terdiri dari:

1. Sekretariat Perwakilan
2. Subauditorat Jambi I
3. Subauditorat Jambi II; dan
4. Kelompok Penjabat Fungsional.

Adapun penjabaran tugas dari masing-masing unsur pelaksana tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Sekretariat Perwakilan**

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Jambi terdiri dari:

#### **a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan:**

Unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

#### **b. Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM);**

Unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

#### **c. Subbagian Keuangan;**

Unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi;

Unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

e. Subbagian Hukum;

Unit kerja ini mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

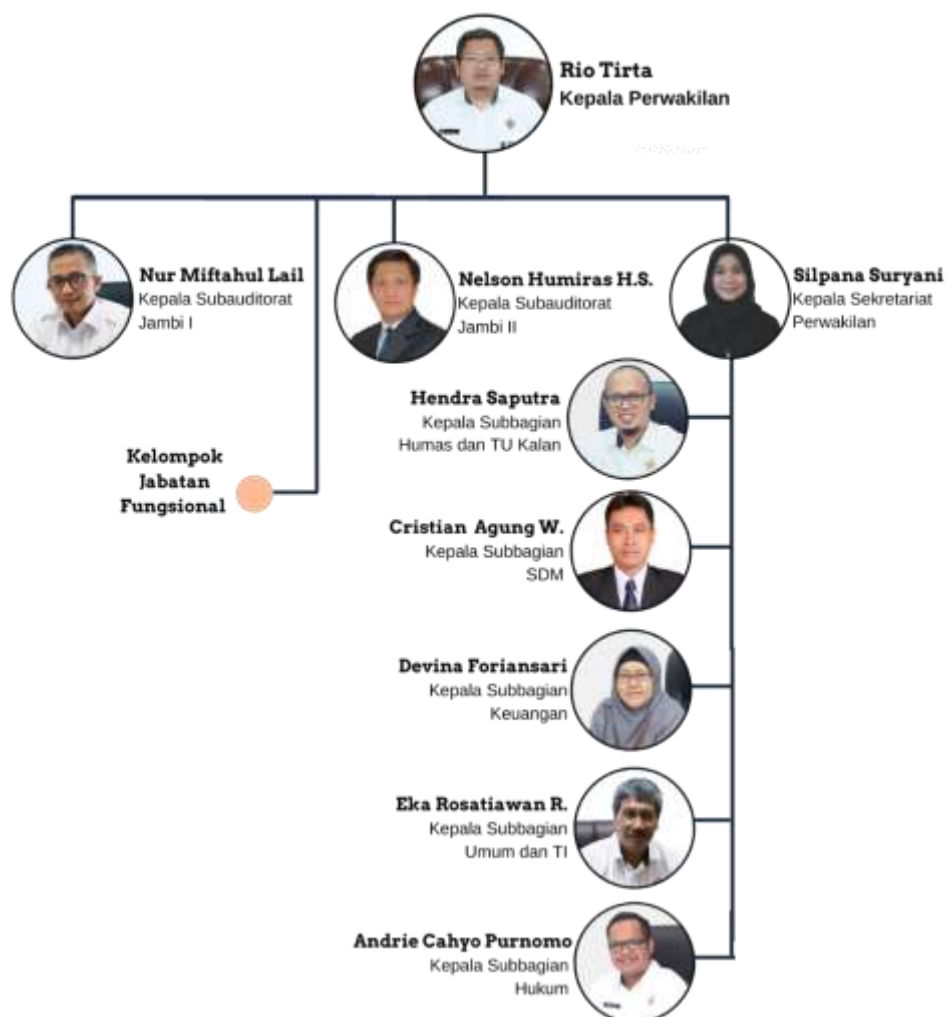
**2. Subauditorat Jambi I**

Mempunyai tugas pemeriksaan dengan lingkup wilayah kerja Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batang Hari, Kota Sungai Penuh, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

**3. Subauditorat Jambi II**

Mempunyai tugas pemeriksaan dengan lingkup wilayah kerja Pemerintah Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

## STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI



Gambar 3. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jambi

### E. SUMBER DAYA

#### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang terdapat di BPK Perwakilan Provinsi Jambi berdasarkan bezetting pegawai periode 31 Desember 2021 sebanyak 116 orang yang terdiri dari 97 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 19 Tenaga Tidak Tetap. PNS yang dimaksud terdiri dari:

- Sembilan orang Pejabat Struktural, yaitu Kepala Perwakilan, dua orang Kepala Subauditorat, Kepala Sekretariat Perwakilan, Kepala Subbagian Humas dan TU Kalan, Kepala Subbagian SDM, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Umum dan TI, dan Kepala Subbagian Hukum;

- b. 65 orang Pejabat Fungsional Pemeriksa yang terdiri dari 6 orang Pemeriksa Madya, 19 orang Pemeriksa Muda, dan 40 orang Pemeriksa Pertama;
- c. Satu orang Pejabat Pranata Humas Ahli Pertama;
- d. 22 orang Pejabat Pelaksana pada Sekretariat Perwakilan;
- e. 19 orang Tenaga Tidak Tetap yang terdiri dari satu orang Dokter Umum, satu orang Perawat, tiga belas orang Tenaga Satuan Pengaman, tiga orang Pengemudi, dan satu orang Resepsionis.

## 2. Sumber Daya Keuangan

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Jambi memperoleh anggaran senilai Rp20.730.288.000,00. Anggaran per keluaran pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Jenis Keluaran	Total Pagu Revisi (Rp)	Target Volume	Satuan
1	Layanan Perkantoran	11.316.518.000	1	Layanan
2	Layanan Sarana Internal	392.313.000	54	Layanan
3	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jambi	3.429.276.000	22	LHP
4	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi	263.141.000	120	LHP
5	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	589.443.000	1	LHP
6	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	8.480.000	1	Rumusan
7	Sumbangan IHPS Perwakilan	4.569.000	2	Sumbangan IHPS
8	Laporan Profil Entitas Perwakilan	11.996.000	12	Laporan
9	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jambi	256.000.000	24	Laporan
10	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Jambi	234.100.000	24	Laporan
11	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jambi	2.411.906.000	21	LHP
12	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	321.335.000	12	Laporan
13	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.491.211.000	21	Laporan
	Total	20.730.288.000		

Tabel 1. RKA dan Keluaran DIPA BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2021

## 3. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung kegiatan Pemeriksaan dan Penunjang, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, diantaranya:

- a. Lantai 1
  - Lobi resepsionis
  - Ruang Rapat Siginjai (untuk tamu eksternal)
  - Ruang Akustik “Akuntabilitas Untuk Semua” (PIK dan Perpustakaan)
  - Ruang Subbagian Hukum
  - Ruang Subbagian Umum dan TI
  - Koperasi
- b. Lantai 2
  - Ruang Kepala Perwakilan
  - Ruang Rapat Angso Duo (Ruang Rapat Kepala Perwakilan)
  - Ruang Kepala Sekretariat Perwakilan
  - Ruang Zi-Zo (*Video Conference*)
  - Ruang Subbagian Humas dan TU
  - Ruang Subbagian Keuangan
  - Ruang Subbagian SDM
  - Auditorium
  - Ruang Rapat Kayu Aro
  - Poliklinik
  - Ruang Laktasi
  - Mushola
- c. Lantai 3
  - Ruang Kepala Subauditorat Jambi I
  - Ruang Kepala Subauditorat Jambi II
  - Ruang Subauditorat Jambi I dan Jambi II
  - Ruang Rapat Subauditorat Jambi I
  - Ruang Rapat Subauditorat Jambi II
  - Ruang Gym
- d. Halaman Upacara
- e. Halaman Parkir Mobil dan Motor
- f. Mess BPK Perwakilan Provinsi Jambi
- g. Rumah Jabatan BPK Perwakilan Provinsi Jambi

## **F. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUES*)**

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan dari BPK Perwakilan Provinsi Jambi meliputi hal-hal berikut:

1. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.

Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang masih dibawah 75%. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi yang tinggi menunjukkan adanya upaya dari pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik sesuai dengan rekomendasi BPK yang telah disampaikan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, menunjukkan kepada masyarakat peran BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

2. Hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memberikan dampak yang baik atas pemeriksaan BPK terhadap transparansi dan akuntabilitas Keuangan Negara.

Komunikasi pemeriksaan yang efisien dan efektif perlu diperhatikan dan dilaksanakan. Komunikasi ini dilakukan dalam seluruh proses pemeriksaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan proses tindak lanjut.

3. Peningkatan pemahaman dan para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK.

Adanya anggapan sebagian masyarakat yang menilai bahwa opini WTP yang diberikan kepada entitas menunjukkan bahwa seharusnya entitas tersebut bersih dari tindak pidana korupsi. Menindaklanjuti kondisi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jambi perlu mengadakan kegiatan berupa diskusi/sosialisasi tentang pemahaman atas tugas dan kewenangan BPK.

4. Pemahaman dan implementasi nilai-nilai dasar BPK yang perlu dijaga dan terus ditingkatkan.

Pegawai BPK yang memegang teguh nilai-nilai dasar BPK “Independensi, Integritas dan Profesionalisme” dapat mencegah intervensi dari berbagai pihak dalam melaksanakan tugasnya.



*Gambar 4. Kegiatan Media Workshop dengan tema “Jenis-jenis pemeriksaan di BPK”*

5. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di BPK Perwakilan yang dilakukan dengan partisipasi aktif dari pegawai untuk mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi dan pelaksanaan aktivitas berbagi pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Jambi.



# **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2021**



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Jambi 2020 – 2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK untuk periode tahun 2020 – 2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jambi 2020 – 2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan merespon dampak pandemi COVID-19. Hal ini merupakan langkah yang ditujukan agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Oleh karena itu, sebagai lembaga yang mendapat mandat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme menjadi semangat moral yang selalu dijunjung tinggi dan diimplementasikan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab BPK. Selanjutnya, sistem pengendalian mutu BPK di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi juga semakin dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan BPK.

Renstra menjabarkan rancangan atas rencana lima tahunan BPK Perwakilan Provinsi Jambi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. BPK Perwakilan Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pemeriksaan. Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan menyusun strategi pemeriksaan dan meningkatkan sinergi dengan Institusi Penegak

Hukum (IPH) dalam merespon seluruh permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli. Untuk memperkuat sumber daya pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan meningkatkan kualitas sumber daya yang andal dan profesional melalui peningkatan kompetensi.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni (1) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut.

- Strategi 1 : Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis
- Strategi 2 : Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif
- Strategi 3 : Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara
- Strategi 4 : Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara
- Strategi 5 : Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jambi 2020-2024 didukung dengan kerangka kelembagaan yang disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional. Selanjutnya pelaksanaan renstra ini didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan renstra. Pelaksanaan Renstra BPK 2020–2024 dan RIR akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2020 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disepakati bersama oleh Kepala Perwakilan sebagai Kepala Satuan Kerja dan Tortama KN V selaku Atasan Kepala Perwakilan. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam Peta Strategi baik Tingkat Eselon I (Tortama KN V) maupun BPK Perwakilan Provinsi Jambi sebagai berikut.



Gambar 5. Peta Strategi Tortama KN V dan BPK Perwakilan Provinsi Jambi

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dan pada bulan Maret 2021, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi menandatangani dalam bentuk kontrak Perjanjian Kinerja (PK) 2021 dengan Auditor Utama Keuangan Negara V selaku atasan langsung. Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran	Indikator Kinerja		Target
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas</li> <li>• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan</li> </ul>	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5)
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87)
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%

Tabel 2. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2021



# **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2021**

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

Pengukuran capaian kinerja tahun 2021 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang telah disepakati dalam PK 2021. Berdasarkan hasil pengukuran capaian target kinerja yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK, maka skor yang diperoleh terhadap capaian target dimaksud adalah sebesar **98,97**. Realisasi target masing-masing indikator kinerja utama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Sasaran Kegiatan, Sasaran	Indikator Kinerja		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Skor IKU
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas</li> <li>• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan</li> </ul>	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	93,85%	93,85
	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	70,20%	93,60
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,40%	100,40
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	101,80%	101,80
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,44%	100,44
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,42	88,40
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	A (87,94)	101,08
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	99,31%	103,45
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100,00
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3,81	100,26
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100
	IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,5%	90,49%	103,42

Tabel 3. Realisasi Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2021

Capaian target kinerja tahun 2021 sebesar 98,97 merupakan hasil upaya seluruh unsur unit kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang secara konsisten dan terus menerus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kinerja Satuan Kerja.

Total skor capaian kinerja tahun 2021 sebesar 98,97, lebih rendah dari skor capaian kinerja tahun 2020 sebesar 99,36. Secara akumulatif, penurunan capaian skor kinerja ini disebabkan oleh tidak tercapainya tiga indikator kinerja dari 13 indikator yang ditetapkan. Secara ringkas, gambaran perolehan skor sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan, Sasaran	Indikator Kinerja		Skor Tahun 2020	Skor Tahun 2021	Ket.
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas</li> <li>• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan</li> </ul>	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	95,83	93,85	Turun
	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100	100	Tetap
	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	94,27	93,60	Turun
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,63	100,40	Turun
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100	101,80	Naik
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100	100,40	Naik
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	90,00	88,40	Turun
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	102,19	101,08	Turun
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	104,54	103,45	Turun
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	105,00	100,00	Turun
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	101,05	100,26	Turun
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	98,95	100	Naik
	IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	105,00	103,42	Turun
<b>Total</b>			99,36	98,97	Turun

Tabel 4. Perbandingan Skor Capaian Target IKU Tahun 2020 dan Tahun 2021

## A.1. INDIKATOR KINERJA

### 1. IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil revidi Itama.

Pengukuran IKU 1 diperoleh dari hasil kuesioner yang dilakukan kepada seluruh Tim Pemeriksa baik kepada Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP), Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP), dan pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) untuk seluruh tahapan pemeriksaan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan terhadap setiap jenis pemeriksaan baik LKPD, Kinerja maupun PDTT. Kuesioner pemenuhan QC diisi oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa, yang terdiri dari Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu. Sedangkan kuesioner pemenuhan QA diisi oleh Pejabat Struktural Pemeriksa, yang terdiri dari Kepala Subauditorat dan Kepala Satuan Kerja dalam hal ini Kepala Perwakilan.

#### IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Target 100%

Realisasi 93,85 %

Skor Kinerja 93,85

Berdasarkan Perjanjian Kinerja pada IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, skor IKU 1 ini ditargetkan bernilai 100% dan tercapai senilai 93,85%. Realisasi bernilai 93,85% ini didapat dari:

- a. 100% hasil QA dan QC atas 23 *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- b. 87,69% Hasil Evaluasi EPP, dimana tingkat akurasi atas LHP bernilai 100% dan tingkat konsistensi atas LHP bernilai 69,23%. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Direktorat EPP Nomor 493/ND/XII.2/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021, terdapat empat LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2020 yaitu atas Pemerintah Kabupaten Keinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun yang memperoleh nilai 0 karena adanya inkonsistensi pada LHP yang diterbitkan.



c. 100 Hasil Reviu Inspektorat Utama (Itama).

Sepanjang tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah melaksanakan 23 kegiatan pemeriksaan diluar pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik pada pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi. Kegiatan pemeriksaan tersebut terdiri:

- a. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 12 pemerintah daerah di Provinsi Jambi;
- b. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam rangka Intensifikasi Penerimaan Pendapatan PKB dan BBNKB Tahun 2020 pada Provinsi Jambi;
- c. Pemeriksaan kinerja atas upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran (TA) 2020 dan TA 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian;
- d. Pemeriksaan kinerja atas Penyelenggaraan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja dalam rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Instansi terkait lainnya di Jambi;
- e. Pemeriksaan kinerja atas Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi dan Instansi terkait lainnya;
- f. Pemeriksaan kinerja atas Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kota Jambi di Jambi, dan Instansi terkait lainnya;
- g. Pemeriksaan kinerja atas Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Kerinci di Siulak dan Instansi terkait lainnya;
- h. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bungo dan Instansi Terkait Lainnya di Muara Bungo;
- i. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Jambi di Jambi;
- j. Pemeriksaan atas Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak;

- k. Pemeriksaan atas Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal;
- l. Pemeriksaan atas Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga (BTT) yang menjadi Aset Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi.

Perbandingan realisasi capaian IKU 1 tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

Indikator Kinerja		Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2020
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	93,85%	93,85%

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 1 Tahun 2020 dan Tahun 2021

Perbandingan realisasi IKU 1 tahun 2021 dengan dengan capaian target jangka menengah (renstra) disajikan pada tabel 6 berikut ini:

Indikator Kinerja		Target Kinerja 5 Tahun					Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	93,85%	95,85%

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 1 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra

Berdasarkan tabel 5, realisasi tahun 2021 jika dibandingkan dengan target tahun 2020 mengalami penurunan dan masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan realisasi tahun 2021 yang dibandingkan dengan target kinerja 2024 juga masih belum mencapai target yang telah ditetapkan (Tabel 6).

Menindaklanjuti kondisi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jambi tetap berupaya untuk meningkatkan dan mencapai target IKU 1 di tahun selanjutnya dengan cara sebagai berikut:

- a. Berperan aktif dalam melaksanakan pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan melalui *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) atas pelaksanaan pemeriksaan.

- b. Berupaya untuk meningkatkan ketelitian dan kecermatan pada pelaksanaan reviu berjenjang LHP, sehingga dapat meningkatkan konsistensi dan akurasi LHP serta meningkatkan hasil reviu penilaian itama.

Anggaran yang digunakan untuk tahun 2021 pada IKU 1 adalah keluaran Layanan Manajemen Pemeriksaan sebesar Rp321.335.000,00. Sampai dengan bulan Desember 2021, telah direalisasikan sebesar Rp314.319.50,00 atau sebesar 97,82%.

## 2. IKU 2. **Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan**

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). IKU ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Berdasarkan PK 2021 pada IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan, skor IKU 2 ini ditargetkan senilai 100% dan telah tercapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	
	Target 100%
	Realisasi 100%
	Skor Kinerja 100

BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah berhasil memenuhi harapan penugasan atas laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan pada tahun 2021 ini dan akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas LHP melalui kesesuaian simpulan dalam LHP dengan Program Pemeriksaan (P2) yang telah ditetapkan.

Perbandingan realisasi capaian IKU 2 tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini:

Indikator Kinerja		Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2020
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 2 Tahun 2020 dan Tahun 2021

Perbandingan realisasi IKU 2 tahun 2021 dengan dengan capaian target jangka menengah (renstra) disajikan pada tabel 8 berikut ini:

Indikator Kinerja		Target Kinerja 5 Tahun					Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 2 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra

Berdasarkan tabel 7 diatas, realisasi tahun 2021 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 dan target kinerja tahun 2024 bernilai tetap (tidak naik/turun) dan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa IKU 2 dapat memenuhi target perencanaan strategis BPK Perwakilan Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Jambi tetap berupaya untuk dapat menyusun P2 dengan lebih cermat sehingga memberikan kesesuaian terhadap harapan penugasan atas LHP yang diterbitkan.

Berdasarkan RKA Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Jambi memperoleh alokasi anggaran untuk kegiatan pemeriksaan sebesar Rp6.693.766,00. Sampai dengan bulan Desember 2021, anggaran yang telah terealisasikan sebesar Rp6.600.468.058,00 atau sebesar 98,61%.

### 3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan kementerian/lembaga/pemda dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara dalam periode Renstra. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 20 menyebutkan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dihitung berdasarkan persentase jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi keseluruhan selama tahun 2005 s.d. 2021. Dan untuk tahun 2005 sampai dengan 2021 jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 9.766 rekomendasi dan tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 6 rekomendasi dari 13.921 rekomendasi.

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	
Target 75%	
Realisasi 70,20 %	
Skor Kinerja 93,59	

Pada tahun 2021, realisasi capaian IKU Persentase TLRHP bernilai 70,20% dengan target 75%. Realisasi IKU Persentase TLRHP tahun 2021 masih dibawah target kinerja yang ditetapkan. Perbandingan realisasi capaian IKU 3 tahun 2021 dengan tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini:

Indikator Kinerja		Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2019
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	70,20%	70,70,%	73,93%

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 3 Tahun 2020 dan Tahun 2021

Perbandingan realisasi capaian IKU 3 tahun 2021 dengan tahun sebelumnya (2019 dan 2020) mengalami penurunan, dari 73,93% ditahun 2019 turun menjadi 70,70% ditahun 2020 dan turun lagi menjadi 70,20% ditahun 2021. Kondisi tersebut karena penyelesaian TLRHP pada Semester II Tahun 2021 masih dalam proses penyusunan pelaporan sehingga data dari SMP belum menunjukkan nilai yang sebenarnya.

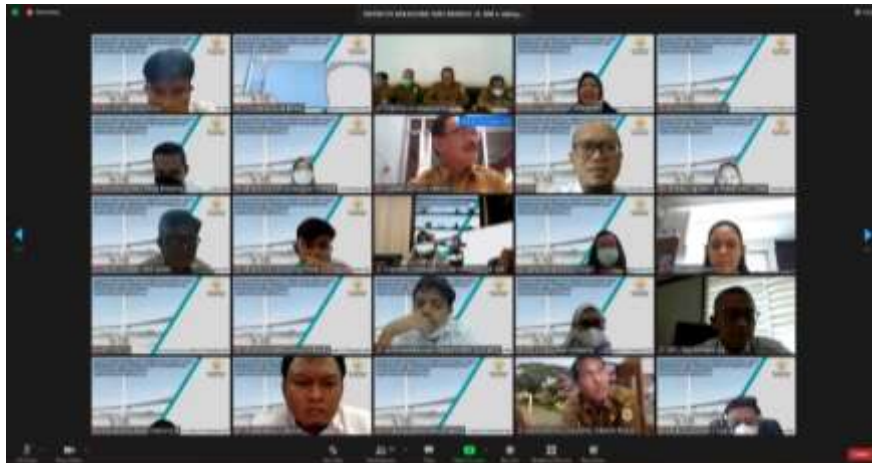
Perbandingan realisasi IKU 3 tahun 2021 dengan dengan capaian target jangka menengah (renstra) disajikan pada tabel 10 berikut ini:

Indikator Kinerja		Target Kinerja 5 Tahun					Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	80%	80%	70,20%	87,75%

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 3 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra

Berdasarkan tabel diatas, persentase realisasi tahun 2021 jika dibandingkan dengan target tahun 2024 mencapai target 87,75%. BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan selalu optimis untuk dapat memenuhi target renstra tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Jambi tetap berupaya untuk meningkatkan capaian target IKU 3 ini ditahun selanjutnya dengan cara:

1. Melakukan percepatan pelaksanaan TLRHP yang dilakukan secara berkala tiap semesternya, yaitu pada Semester I pada tanggal 21 Juni s.d. 5 Juli 2021 dan Semester II pada tanggal 6 s.d. 17 Desember 2021. Kegiatan pembahasan TLRHP dilaksanakan dengan melibatkan Inspektorat dari setiap entitas Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi. Kegiatan ini menghasilkan laporan pemantauan atas TLRHP pada setiap entitas Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi. Usaha menambah frekuensi pembahasan membawa pengaruh terhadap meningkatnya persentase penyelesaian TLRHP.



*Gambar 6. Pembukaan Forum TLRHP yang Dilaksanakan melalui Video Conference*

2. Membuka forum diskusi dengan entitas pemerintah daerah terkait pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.



*Gambar 7. Diskusi dengan Dinas Peternakan Kabupaten Sarolangun terkait Temuan Aset pada Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Sarolangun*

3. Selain itu untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas, disamping melalui forum pembahasan, BPK Perwakilan Provinsi Jambi juga meningkatkan penggunaan aplikasi yang telah disiapkan Kantor Pusat yang berbasis TI, yaitu Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi (SiPTL) oleh Pemerintah Daerah.
4. Membentuk Tim Inventarisasi dan Identifikasi Perkembangan TLRHP untuk status belum selesai dan belum ditindaklanjuti.

Keseluruhan upaya tersebut bertujuan untuk mendorong tingkat penyelesaian TLRHP.

Berdasarkan RKA 2021, BPK Perwakilan Provinsi Jambi memperoleh alokasi anggaran untuk kegiatan pemantauan TLRHP sebesar Rp256.000.000,00 dimana sampai dengan Desember 2021 telah direalisasikan sebesar Rp254.318.000,00 atau sebesar 99,34%.

#### **4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional**

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

Pemeriksaan tematik nasional di BPK Perwakilan Provinsi Jambi meliputi:

1. Pemeriksaan Kinerja atas Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi, Pemerintah Kota Jambi di Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Kerinci di Siulak serta Instansi Terkait Lainnya.
2. Pemeriksaan Kinerja atas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam rangka Mewujudkan SDM Berkualitas dan

Berdaya Saing TA 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Instansi Terkait Lainnya.



Gambar 8. Pemeriksaan Fisik Sarana dan Prasarana Praktik Siswa SMK pada Pemeriksaan Kinerja atas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Dunia Usaha dan Dunia Industri

**IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional**

Target 100%

Realisasi 100,40%

Skor Kinerja 100,40

Capaian IKU 4 BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk Tahun 2021 sebesar 100,40%, karena rencana pemeriksaan tematik yang disusun telah sama dengan realisasi, dan didapat alokasi penambahan skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan sebesar 0,40.

Perbandingan realisasi capaian IKU 4 tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini.

Indikator Kinerja		Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2020
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,40%	100,63%

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 4 Tahun 2020 dan Tahun 2021

Perbandingan realisasi capaian IKU 4 tahun 2021 dengan tahun sebelumnya (2020) mengalami penurunan, dari 100,63% turun menjadi 100,40%.

Perbandingan realisasi IKU 4 tahun 2021 dengan dengan capaian target jangka menengah (renstra) disajikan pada tabel 12 berikut ini:



Indikator Kinerja		Target Kinerja 5 Tahun					Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,63%	100,40%	100%	100%	100%	100%	100,40%

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 4 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra

Berdasarkan tabel diatas, persentase realisasi tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2024 mencapai target 100,40%. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jambi optimis dapat memenuhi target renstra 2024. BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk:

1. Menyusun rencana kegiatan pemeriksaan dengan lebih cermat dan teliti agar sesuai dengan Rencana Kegiatan Tahunan BPK dan sesuai dengan tema/fokus pemeriksaan yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas pemeriksa melalui keikutsertaan aktif dalam diklat agar tetap mampu melaksanakan pemeriksaan tematik nasional maupun lokal.

Sampai dengan bulan Desember 2021, anggaran pemeriksaan terinci yang digunakan untuk pemeriksaan LKPD, Kinerja dan PDDT untuk mendukung pemeriksaan tematik nasional adalah sebesar Rp3.429.276.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.337.030.629,00 atau sebesar 97,31%.

## 5. IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Peningkatan pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

**IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan**

Target 100%

Realisasi 101,80 %

Skor Kinerja 101,80

Capaian IKU 5 BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk Tahun 2021 sebesar 101,80% melebihi target pada rencana aksi. Pada tahun ini, IKU 5 mendapatkan alokasi penambahan skor sebesar 1,795.

Adapun perbandingan realisasi capaian IKU 5 tahun 2021 dengan tahun sebelumnya (tahun 2020) serta capaian target renstra disajikan pada tabel 13 dan 14 berikut ini:

Indikator Kinerja		Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2020
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	101,80%	100%

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 5 Tahun 2020 dan Tahun 2021

Perbandingan realisasi capaian IKU 5 tahun 2021 dengan tahun 2020 mengalami kenaikan.

Indikator Kinerja		Target Kinerja 5 Tahun					Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	101,80%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 5 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra

Berdasarkan tabel diatas, persentase realisasi tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan di tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jambi optimis dapat memenuhi target renstra 2024.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan tetap memberikan layanan dan akses kepada para pemangku kepentingan sehingga dapat dilakukan kajian atas permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas dan kebutuhan pelaksanaan pemeriksaan yang akan dilakukan.

## 6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra.

Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik lokal.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal berdasarkan isu strategis,RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

### IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Target 100%

Realisasi 100,44%

Skor Kinerja 100,44

Capaian IKU 6 BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk Tahun 2021 sebesar 100,44 % melebihi target yang ditetapkan pada rencana aksi dengan adanya alokasi penambahan skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan sebesar 0,44.

Pemeriksaan tematik lokal di BPK Perwakilan Provinsi Jambi meliputi:

1. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah TA 2019 s.d. Sem I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bungo dan instansi terkait lainnya di Muara Bungo.

2. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Bersaing Melalui Perizinan dan Penanaman Modal TA 2020 dan Sem I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Instansi terkait lainnya di Muara Bulian.



Gambar 9. Konfirmasi Petugas Pungut Retribusi Pelayanan Kebersihan pada Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Adapun perbandingan realisasi capaian IKU 6 tahun 2021 dengan tahun sebelumnya (tahun 2020) serta capaian target renstra disajikan pada tabel 15 dan tabel 16 berikut ini:

Indikator Kinerja		Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2020
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 6 Tahun 2020 dan Tahun 2021

Indikator Kinerja		Target Kinerja 5 Tahun					Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 6 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra

Berdasarkan tabel diatas, persentase realisasi tahun 2021 jika dibandingkan dengan target tahun 2020 mencapai target sebesar 100%, bernilai tetap. Dibandingkan dengan target 2024, capaian target tahun 2021 telah memenuhi target tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jambi optimis dapat memenuhi target renstra 2024 sebesar 100% dan akan terus berupaya untuk dapat menyusun rencana

kegiatan pemeriksaan dengan lebih cermat dan teliti agar sesuai dengan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

## 7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU ini mengukur tingkat penerapan nilai-nilai dasar BPK sebagai budaya organisasi oleh seluruh komponen BPK. IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Nilai dasar BPK diterapkan dalam organisasi. IKU ini diukur melalui survey yang dilakukan oleh Direktorat PSMK terhadap penerapan nilai-nilai dasar BPK dari para pegawai.

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	
Target 5,00	
Realisasi 4,42	
Skor Kinerja 88,4	

Berdasarkan perjanjian kinerja pada IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, skor IKU 7 ini ditargetkan bernilai 5,00 dan tercapai senilai 4,42 dibawah target yang telah ditetapkan.

Perbandingan realisasi capaian target IKU 7 pada tahun 2021 dengan tahun sebelumnya (tahun 2019 dan 2020) dan target kinerja renstra dapat dilihat pada tabel 17 dan tabel 18 berikut ini:

Indikator Kinerja		Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2019
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,42	4,50	4,73

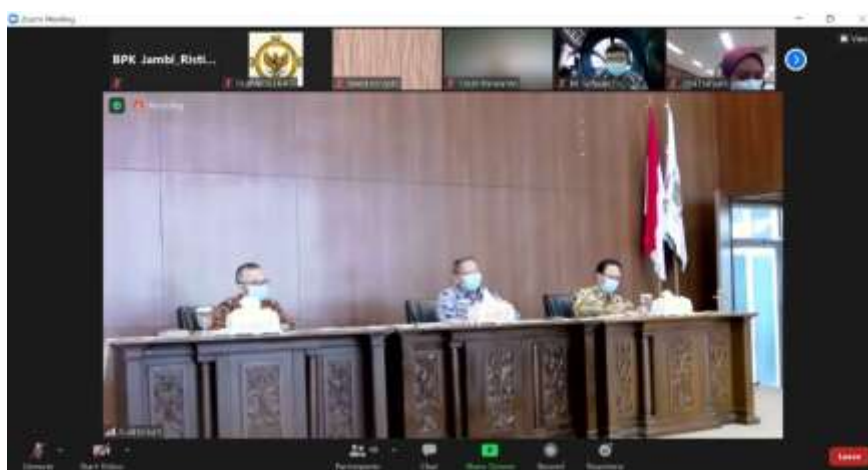
Tabel 17. Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 7 Tahun 2020 dan Tahun 2021

Indikator Kinerja		Target Kinerja 5 Tahun					Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,42	88,40%

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 7 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Direktorat PSMK, realisasi tahun 2021 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu total nilai hasil survei 4,42 dari target 5,00. Dengan demikian capaian tahun 2021 hanya sebesar 88,40%. Kondisi yang sama juga untuk capaian tahun 2020 sebesar 4,50. Hal tersebut disebabkan oleh pengisian

kuesioner yang dikirimkan Direktorat PSMK tidak mencapai sasaran yang diharapkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas jawaban. Hal tersebut akan menjadi perhatian dan komitmen Pimpinan dan seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk capaian kinerja tahun berikutnya dengan meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai dasar BPK sebagai acuan utama dalam berperilaku baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan personalnya melalui berbagai media seperti sosialisasi dan kegiatan pelatihan di kantor sendiri terkait pemahaman dan implementasi nilai-nilai dasar BPK.



*Gambar 10. Pengarahan Kepala Perwakilan tentang Nilai Dasar BPK kepada Pemeriksa sebelum Melaksanakan Pemeriksaan*

## **8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP**

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK. IKU tentang Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jambi ini bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker. IKU 8 muncul di tahun 2019 pada IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jambi.

Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja pada IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP ini ditargetkan bernilai 87,00 (A) dan tercapai nilai 87,94 (A) mencapai target yang telah ditetapkan.

<b>IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP</b>	
Target 87,00	
Realisasi 87,94	
Skor Kinerja 101,08	

Pencapaian IKU 8 dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel 19 berikut.

Indikator Kinerja		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian				
				2020	2019	2018	2017	2016
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A	A	A	A	BB	A	A

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 Tahun 2016 s.d. 2021

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 394/ND/XI/09/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi, evaluasi dilaksanakan terhadap lima komponen akuntabilitas kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.

Adapun langkah perbaikan atas hasil evaluasi tersebut sebagaimana rekomendasi Inspektur Utama yaitu:

1. Pengukuran Kinerja

Menyusun Perjanjian Kinerja Pegawai tingkat Eselon III, IV, dan individu dengan menggunakan ukuran kinerja Eselon II yang tercantum pada Perjanjian Kinerja, serta melaksanakan monitoring pencapaian kinerja secara berkala.

2. Pelaporan Kinerja

Menyempurnakan LAKIN dengan menyajikan informasi pencapaian kinerja dan informasi kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam PK, menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk seluruh indikator, meningkatkan kualitas informasi mengenai perbandingan antara realisasi dan capaian sesuai dan menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya sesuai Keputusan Sekjen Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017.

### 3. Evaluasi Internal

Meningkatkan kualitas dokumentasi proses evaluasi internal dan dokumentasi proses tindak lanjut dari rekomendasi serta menyampaikan dokumen tindak lanjut kepada itama.

### 4. Capaian Kinerja

Meningkatkan kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan pencapaian tahun berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		Target Kinerja 5 Tahun					Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A 86,00	A 87,00	A 88,00	A 89,00	A 89,05	A 87,94	98,75%

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 8 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian tahun 2021 hampir memenuhi target tahun 2022. BPK Perwakilan Provinsi Jambi terus berupaya untuk melakukan perbaikan penyajian Laporan Kinerja Tahun 2021 dengan memperhatikan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Itama sehingga tersaji LAKIN yang informatif dan relevan.

## 9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (*e-mail, e-Drive, portal*), layanan aplikasi umum (*SISDM*), serta layanan aplikasi pemeriksaan (*SMP, SiAP, SiPTL, Big Data Analytic*). Selain itu, Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan.

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi pemeriksaan (*SMP, SIAP, portal eAudit, SIPTL* dan penggunaan *Big Data Analytics*) dan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong IT culture di lingkungan BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.



Untuk mendorong *IT Culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

<b>IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi</b>
Target 96%
Realisasi 99,31%
Skor Kinerja 103,45

Berdasarkan penilaian dari Biro TI, Capaian IKU 9 BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2021 sebesar 99,31% melebihi target pada rencana aksi sebesar 96%.

Capaian ini meliputi:

- Layanan Dasar, sebesar 100%
- Layanan Aplikasi Umum, sebesar 97,24%
- Layanan Aplikasi Pemeriksaan, sebesar 100%

Realisasi tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Perbandingan capaian realisasi IKU 9 dari tahun 2016 s.d. 2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel 21 berikut.

Indikator Kinerja		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian				
				2020	2019	2018	2017	2016
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	99,31%	99,31%	99,17%	97,99%	78%	86,56%

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 Tahun 2016 s.d. 2021

Indikator Kinerja		Target Kinerja 5 Tahun					Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 9	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	95%	96%	97%	98%	100%	99,31%	99,31%

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 9 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra

Berdasarkan tabel 22 diatas, pencapaian tahun 2021 telah memenuhi target sampai dengan tahun 2023 dan BPK Perwakilan Provinsi Jambi optimis dapat mencapai target renstra Tahun 2024. Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Jambi terus berupaya untuk mendorong para pegawai dalam meningkatkan kepedulian atas penggunaan pemanfaatan layanan dasar, layanan aplikasi umum, dan layanan aplikasi pemeriksaan. Hal ini

tercermin dari aktifnya para pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jambi dalam memanfaatkan TI melalui penggunaan *e-mail* BPK, *e-Drive* BPK, Portal, penggunaan aplikasi jasmin, pemutakhiran data kepegawaian pada aplikasi SISDM dan penggunaan aplikasi pemeriksaan seperti SiAP, SMP, dan SiPTL.

## 10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.



Gambar 11. Aktivitas Berbagi Pengetahuan terkait Aplikasi JASMIN

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, *review* pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum berbagi pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan

pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Penilaian IKU ini melalui Tingkat Penyusunan *Best Practice*, Tingkat Penerapan *Best Practice*, dan Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja pada IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, skor IKU 10 ini bernilai 100% dan telah terealisasi mencapai target senilai 100% yang terdiri dari :

1. 100% Tingkat Penyusunan *Best Practice*
2. 100% Tingkat Penerapan *Best Practice*, dan
3. 100% Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan.

<b>IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan</b>	
Target 100%	
Realisasi 100%	
Skor Kinerja 100	

Pada Tahun 2021, Capaian BPK Perwakilan Provinsi Jambi atas IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat Penyusunan *Best Practice*, dengan judul NGOBRAS “Ngobrol Santai Bareng Seseorang”, melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Provinsi Jambi Nomor 318/ND/XVIII.JMB/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 dan Hasil Penilaian dari Direktorat EPP melalui Nota Dinas 11/ND/XII/01/2022 tanggal 4 Januari 2022;
2. Tingkat Penerapan *Best Practice*, dengan judul Pembangunan “SI KLINIK” melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Provinsi Jambi Nomor 353/ND/XVIII.JMB/11/2021 tanggal 19 November 2021; dan
3. Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan yang disampaikan melalui Nota Dinas Nomor 7/ND/XVIII.JMB/1/2022 tanggal 7 Januari 2022.

Perbandingan capaian realisasi IKU 10 dari tahun 2018 s.d. 2021 menunjukkan secara rinci dapat dilihat pada tabel 23 berikut.

Indikator Kinerja		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian		
				2020	2019	2018
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	125%	100%	100%

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 10 Tahun 2018 s.d. 2021

Berdasarkan tabel 23, capaian target IKU 10 tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Pencapaian tahun 2021 telah memenuhi target renstra tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi dan akan tetap melakukan upaya pengelolaan pengetahuan demi tercapainya target renstra 2024.

Indikator Kinerja		Target Kinerja 5 Tahun					Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	125%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 10 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra

Untuk meningkatkan manfaat pengembangan manajemen pengetahuan, BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan berupaya:

1. Membentuk Tim Manajemen Pengetahuan yang nantinya akan menyusun rencana aktivitas manajemen pengetahuan yang akan dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Jambi selama satu tahun.
2. Mendokumentasikan proses pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
3. Melakukan identifikasi *best practice* dari setiap unit kerja yang nantinya akan diusulkan menjadi *best practice* perwakilan.

## 11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh perwakilan. Indikator ini bertujuan untuk mendorong perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja pada IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi, target IKU 11 tahun 2021 sebesar 3,80 (Memuaskan) dan terealisasi sebesar 3,81 (Memuaskan) diatas target yang telah ditetapkan.

**IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi**

Target 3,80

Realisasi 3,81

Skor Kinerja 100,26

Skala Pengukuran IKU tersebut adalah:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Perbandingan capaian realisasi IKU 11 tahun 2021 dengan tahun 2020 mengalami penurunan dari nilai 3,84 menjadi 3,81 tapi masih diatas target yang telah ditetapkan yaitu 3,80. Perbandingan tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel 25 berikut.

Indikator Kinerja		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2020
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,81	3,84

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 11 Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja		Target Kinerja 5 Tahun					Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,81	100,26%

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 10 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian tahun 2021 sudah memenuhi target renstra tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas komunikasi kepada para pemangku kepentingan melalui berbagai kegiatan perwakilan diantaranya penyerahan LK Unaudited dari entitas kepada BPK Perwakilan, *Entry Meeting* dan *Exit Meeting* kegiatan pemeriksaan, Pembahasan *Action Plan*, Penyerahan LHP atas LKPD, Pembahasan TLRHP dan Kerugian Negara/Daerah, Kegiatan Media Workshop dengan Media Massa, dan pemanfaatan maksimal ruangan AkUSTIK (Akuntabilitas Untuk Semua dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk internal dan eksternal BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

## 12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi BPK dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan berkelanjutan pegawai BPK. Adapun pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam dua tahun (SPKN) yang berarti standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP untuk pemeriksa dalam setahun.
2. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam satu tahun (UU 5 2014).

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	
Target 100%	
Realisasi 100%	
Skor Kinerja 100	

Capaian IKU 12 Tahun 2021 sebesar 100% dan telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari 97 pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jambi, seluruhnya telah memenuhi jam diklat yang telah ditetapkan.

Realisasi IKU 12 tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Perbandingan capaian realisasi IKU 12 dari tahun 2016 s.d. 2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel 27 berikut.

Indikator Kinerja		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian				
				2020	2019	2018	2017	2016
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	98,95%	100%	94,12%	83,33%	90,32%

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 Tahun 2016 s.d. 2021

Perbandingan realisasi IKU 12 tahun 2021 dengan target kinerja renstra tahun 2024 disajikan pada tabel 28 berikut ini:

Indikator Kinerja		Target Kinerja 5 Tahun					Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 12 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra

Berdasarkan tabel 28 diatas, pencapaian tahun 2021 telah mampu memenuhi target renstra tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Jambi selalu optimis dalam mencapai pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi pada tahun-tahun selanjutnya. Upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jambi dalam mencapai target pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi pegawai yaitu:

1. Menyampaikan informasi terkait kalender diklat triwulanan kepada seluruh pegawai untuk menyusun usulan pegawai yang akan mengikuti diklat.
2. Menginventarisasi kebutuhan diklat pegawai.
3. Menyusun laporan monitoring jam diklat setiap triwulan yang disampaikan kepada seluruh unit kerja untuk dijadikan dasar monitoring atasan terhadap pemenuhan jam diklat pegawai di setiap unit kerja.

### 13. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran.

Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode. IKU ini merupakan upaya BPK Perwakilan Provinsi Jambi dalam mendukung pengelolaan keuangan BPK yang efisien, efektif dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran. Tingkat kinerja atas aspek implementasi adalah

evaluasi tingkat kinerja untuk menghasilkan informasi kinerja atas penggunaan anggaran dalam mencapai keluaran sesuai PMK 22 tahun 2021, yang diukur dengan empat variabel, yaitu:

1. penyerapan anggaran
2. konsistensi antara penyerapan anggaran terhadap perencanaan
3. pencapaian output
4. efisiensi

EPA adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksana pemeriksaan tersebut.

<b>IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran</b>	
Target 87,50%	
Realisasi 90,49%	
Skor Kinerja 103,42	

Realisasi capaian IKU ini di tahun 2021 sebesar 90,49%, melebihi target sebesar 87,50%, sehingga skor menjadi 103,42.

Selanjutnya uraian atas capaian IKU ini dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, secara rinci dapat dilihat pada tabel 29 berikut.

Indikator Kinerja		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian				
				2020	2019	2018	2017	2016
IKU 13	Tingkat kinerja Implementasi Kinerja	87,50%	90,49 %	93,30%	83,37	83,78%	86,08%	92,77%

*Tabel 29. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 Tahun 2016 s.d. 2021*

Perbandingan realisasi IKU 13 tahun 2021 dengan target kinerja renstra tahun 2024 disajikan pada tabel 30 berikut ini:



Indikator Kinerja		Target Kinerja 5 Tahun					Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 13	Tingkat kinerja Implementasi Kinerja	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%	90,49 %	102,02%

*Tabel 30. Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU 13 Tahun 2021 dengan Capaian Target Renstra*

Berdasarkan tabel 30 diatas, pencapaian tahun 2021 telah mampu memenuhi target renstra tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Jambi selalu optimis dan terus berupaya dalam mencapai pemenuhan tingkat kinerja anggaran ditahun selanjutnya, melalui penyusunan rencana aksi pelaksanaan anggaran sesuai RKA:

1. Melakukan sosialisasi atas rencana aksi pelaksanaan anggaran 2021 sesuai RKA.
2. Melakukan pemantauan atas proses pengelolaan keuangan dan anggaran terkait pencapaian keluaran, penyerapan anggaran, dan pencairan dana sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan.
3. Menyusun laporan keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jambi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara.

## A.2. INDIKATOR KINERJA KELUARAN

Indikator Kinerja Keluaran (IKK)		Target 2021	Realisasi Tahun 2021
IKK 1	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%
IKK 2	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan Parpol	100%	100%
IKK 3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK	100%	100%
IKK 4	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%	100%
IKK 5	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%	100%
IKK 6	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%	100%
IKK 7	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%
IKK 8	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Ganti Kerugian Negara atau Daerah	100%	100%
IKK 9	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Pendahuluan /Interim	100%	100%
IKK 10	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	100%	100%
IKK 11	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	100%	99%
IKK 12	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	1 Paket	1 Paket
IKK 13	Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Paket	1 Paket
IKK 14	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket	1 Paket
IKK 15	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%	98,06%
IKK 16	Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%	99,24%

Tabel 31. Perbandingan Target dan Realisasi pada Indikator Kinerja Keluaran

### 1. IKK 1 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan

Ketepatan waktu penyampaian LHP merupakan salah satu indikator dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Ketepatan waktu penyampaian LHP diatur dengan Undang-undang Nomo 15 Tahun 2004, sementara untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu didasarkan pada perencanaan penyelesaian pemeriksaan yang dinyatakan dalam Program Pemeriksaan (P2).

Kriteria Persentase Ketepatan Waktu berdasarkan P2:

1. Penyampaian tepat waktu = 100%
2. Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95%
3. Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja =90%

4. Penyampaian terlambat >10 hari kerja =85%

Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian LHP Keuangan/Kinerja/DTT kepada entitas/stakeholder.

<b>IKK 1 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP</b>
Target 100%
Realisasi 100%

Realisasi capaian IKK 1 pada tahun 2021 sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena seluruh LHP yang diterbitkan pada tahun 2021 telah disampaikan tepat waktu.

## **2. IKK 2 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan pada Parpol**

Ketepatan waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Ketepatan waktu penyampaian LHP pada pemeriksaan Banparpol diatur dalam Peraturan BPK No.2 Tahun 2015.

Kriteria Persentase Ketepatan Waktu berdasarkan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2015:

- a. Penyampaian tepat waktu = 100%
- b. Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95%
- c. Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja =90%
- d. Penyampaian terlambat >10 hari kerja =85%

Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian LHP Banparpol kepada entitas/stakeholder.

<b>IKK 2 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP Bantuan Keuangan pada Parpol</b>
Target 100%
Realisasi 100%

Realisasi capaian IKK 2 pada tahun 2021 sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menyerahkan 120 LHP Bantuan Keuangan Parpol kepada entitas dengan tepat waktu.

### 3. **IKK 3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK**

Ketepatan waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Ketepatan waktu penyampaian LHP untuk pemeriksaan keuangan diatur dengan Undang-undang No.15 Tahun 2004. Ketepatan waktu penyampaian LHP oleh KAP diukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan oleh KAP.

Kriteria Persentase Ketepatan Waktu berdasarkan P2:

- a. Penyampaian tepat waktu = 100%
- b. Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95%
- c. Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja =90%
- d. Penyampaian terlambat >10 hari kerja =85%

Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian LHP oleh KAP kepada entitas/stakeholder.

<b>IKK 3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK</b>
---

Target 100%
-------------

Realisasi 100%
----------------

Realisasi capaian IKK 3 pada tahun 2021 sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK atas LKPD TA 2020 pada Pemerintah Kota Sungai Penuh telah diserahkan tepat waktu pada tanggal 15 Maret 2021.

### 4. **IKK 4 Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat**

Indikator ini menunjukkan tingkat produktivitas Auditorat Keuangan Negara (AKN) terkait pelaksanaan tugas dalam hal memberikan bahan pertimbangan dan bahan pendapat BPK kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. Usulan bahan pendapat bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan melalui penyusunan usulan bahan pendapat ke Ditama Revbang sebagai data base Bahan Pendapat BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kontribusi AKN terkait pelaksanaan tugas/kewenangan BPK memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.

#### IKK 4 Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat

Target 100%

Realisasi 100%

Realisasi capaian IKK 4 pada tahun 2021 sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah mengusulkan Bahan Pendapat melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 319/ND/XVIII.JMB/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

#### 5. **IKK 5 Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP**

Tingkat penyelesaian Input Data hasil pemeriksaan pada aplikasi SMP merupakan salah satu indikator dari efektivitas pelaksanaan pemantauan tindak lanjut. Indikator ini dinilai berdasarkan persentase penyelesaian input data terkait hasil pemeriksaan (rekomendasi) untuk setiap LHP dalam Aplikasi SMP dibanding dengan jumlah LHP yang diterbitkan. Indikator ini mengukur sejauh mana pemeriksa BPK dapat menyelesaikan input data pemeriksaan pada aplikasi SMP untuk mendukung data IHPS.

#### IKK 5 Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP

Target 100%

Realisasi 100%

Realisasi capaian IKK 5 pada tahun 2021 sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah melakukan input data hasil pemeriksaan dari 23 LHP yang telah diterbitkan, yang terdiri dari 12 LHP atas LKPD, delapan LHP Kinerja, dan tiga LHP DTT.

#### 6. **IKK 6 Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas**

BPK Perwakilan Provinsi Jambi memiliki 12 entitas pemeriksaan di wilayah Provinsi Jambi. Setiap tahunnya, BPK Perwakilan Provinsi Jambi melakukan pemutakhiran data profil entitas pemeriksaan tersebut yang tertuang dalam laporan profil entitas.

Tujuan indikator ini adalah untuk menilai pelaksanaan pemutakhiran profil entitas dalam menyediakan informasi tentang data terkini setiap entitas pemeriksaan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan obyek pemeriksaan yang

diukur dengan membandingkan jumlah profil entitas yang mutakhir dengan jumlah entitas pemeriksaan.

IKK 6 Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas
Target 100%
Realisasi 100%

Realisasi capaian IKK 6 pada tahun 2021 sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah melaksanakan pemutakhiran profil entitas pada tanggal 30 Agustus s.d. 3 September 2021 yang menghasilkan 12 Buku Profil Entitas.

## 7. IKK 7 Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pemutakhiran data tindak lanjut dilakukan setiap semester pada Aplikasi SiPTL sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Direktorat EPP.

Kriteria Presentase Ketepatan Waktu :

- a. Penyampaian tepat waktu = 100%
- b. Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95%
- c. Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja = 90%
- d. Penyampaian terlambat >10 hari kerja = 85%

Indikator ini diukur dengan membandingkan persentase pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dengan jumlah entitas pemeriksaan.

IKK 7 Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Target 100%
Realisasi 100%

Realisasi capaian IKK 7 tahun 2021 sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah melaksanakan pemutakhiran data TLHP dua kali dalam setahun, yaitu pada semester I pada tanggal 21 s.d. 25 Juni 2021 dan semester II pada tanggal 6 s.d. 10 Desember 2021.

## 8. IKK 8 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah oleh Perwakilan ke Direktorat EPP disampaikan secara fisik dan melalui input data ke Aplikasi SIKAD sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Direktorat EPP setiap semesternya.

Kriteria Persentase Ketepatan Waktu:

- a. Penyampaian tepat waktu = 100%
- b. Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95%
- c. Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja =90%
- d. Penyampaian terlambat >10 hari kerja =85%

Indikator ini diukur dengan membandingkan persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dengan jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang seharusnya diterbitkan.

### IKK 8 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Target 100%

Realisasi 100%

Capaian IKK 8 pada tahun 2021 sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menyampaikan kepada Ditama Revbang Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah semester I tahun 2021 pada tanggal 13 Juli 2021 melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor dan melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 193.a/ND/XVIII.JMB/7/2021 tanggal 13 Juli 2021 dan semester II tahun 2021 melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 24/ND/XVIII.JMB/1/2022 tanggal 14 Januari 2022.

## 9. IKK 9 Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan

Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan interim/pendahuluan merupakan salah satu indikator dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan. Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan pendahuluan diatur dalam Program Pemeriksaan (P2) Pendahuluan.

Kriteria Persentase Ketepatan Waktu:

- a. Penyelesaian tepat waktu = 100%
- b. Penyelesaian terlambat 1-5 hari kerja = 95%
- c. Penyelesaian terlambat 6-10 hari kerja = 90%
- d. Penyelesaian terlambat >10 hari kerja = 85%

**IKK 9 Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan**

Target 100%

Realisasi 100%

Realisasi capaian IKK 9 pada tahun 2021 sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penyelesaian laporan hasil pemeriksaan interim/pendahuluan dilakukan tepat waktu sesuai dalam P2 yang telah disusun.

**10. IKK 10 Ketepatan Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan**

Laporan manajemen pemeriksaan disusun setiap bulan sesuai dengan Rencana Keluaran yang diinput dalam Aplikasi Prisma Pelaporan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Kriteria Persentase Ketepatan Waktu:

- a. Penyampaian tepat waktu = 100%
- b. Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95%
- c. Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja = 90%
- d. Penyampaian terlambat >10 hari kerja = 85%

Indikator ini diukur dengan membandingkan persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan dengan jumlah Laporan Manajemen Pemeriksaan yang diterbitkan.

**IKK 10 Ketepatan Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan**

Target 100%

Realisasi 100%

Realisasi capaian IKK 10 pada tahun 2021 sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menyusun laporan bulanan secara tepat waktu dan menginputnya ke dalam Aplikasi Prisma Pelaporan.



## 11. IKK 11 Ketepatan Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan

Laporan Manajemen Internal Perwakilan terdiri dari:

1. Laporan Bulanan adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja kepada Unit Kerja di atasnya. Laporan Bulanan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
2. Laporan Kinerja yang terdiri dari Laporan Kinerja Tahunan disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Laporan Kinerja Triwulanan disampaikan paling lambat satu bulan setelah Triwulan berakhir; dan
3. Laporan dan Profil Risiko yang terdiri dari Laporan Penerapan Manajemen Risiko Semester II T-1 dan Tahunan (T-1) yang disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir, Laporan Penerapan Manajemen Risiko Semester I Tahun T disampaikan paling lambat satu bulan setelah semester berakhir, dan Profil risiko disampaikan paling lambat mengikuti Nota Dinas Kepala Direktorat PSMK.

Kriteria Persentase Ketepatan Waktu:

- a. Penyampaian tepat waktu = 100%
- b. Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95%
- c. Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja = 90%
- d. Penyampaian terlambat >10 hari kerja = 85%

### IKK 11 Ketepatan Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan

Target 100%

Realisasi 99%

Realisasi capaian IKK 11 pada tahun 2021 sebesar 99% dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Hal tersebut dikarenakan keterlambatan penyampaian Profil Resiko.

## 12. IKK 12 Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor

Pengadaan Kendaraan Bermotor yang terealisasi dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Bulanan) sesuai realisasi RKA BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

### IKK 12 Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor

Target 1 paket

Realisasi 1 paket

Pengadaan Kendaraan Bermotor pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah terealisasi pada triwulan I tahun 2021 sejumlah 1 paket pengadaan kendaraan bermotor.

### **13. IKK 13 Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi**

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang terealisasi dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Bulanan) sesuai realisasi RKA BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

#### **IKK 13 Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi**

Target 1 paket

Realisasi 1 paket

BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah merealisasikan sejumlah 1 paket pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada triwulan IV tahun 2021.

### **14. IKK 14 Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran**

Pengadaan Perangkat Peralatan Fasilitas Perkantoran yang terealisasi dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Bulanan) sesuai realisasi RKA BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

#### **IKK 14 Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran**

Target 1 paket

Realisasi 1 paket

BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah merealisasikan sejumlah 1 paket pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada triwulan IV tahun 2021.

### **15. IKK 15 Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan**

BPK Perwakilan Provinsi Jambi melalui Subbagian SDM menyelenggarakan kegiatan manajemen SDM, dimana salah satu kegiatannya berupa pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan, yaitu pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi setiap bulan.

#### **IKK 15 Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan**

Target 95%

Realisasi 98,06%

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar 98,06%. Realisasi capaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan.

#### **16. IKK 16 Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor**

Pengadaan Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari perkantoran.

Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor terdiri dari subkomponen, yaitu:

1. Layanan perkantoran bidan Tata Usaha Kepala Perwakilan
2. Layanan perkantoran bidang Kehumasan
3. Layanan perkantoran bidang Sumber Daya Manusia
4. Layanan perkantoran bidang Keuangan
5. Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI

#### **IKK 16 Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor**

Target 95%

Realisasi 99,24%

Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor tahun 2021 sebesar 113,84%. Capaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan.

## B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Jambi memperoleh anggaran sebesar Rp20.730.288.000,00. Sampai dengan bulan Desember 2021, anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp20.467.508.730,00 atau sebesar 98,73%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2021 yaitu:

No	Jenis Keluaran	Volume Keluaran ( <i>Output</i> )				Realisasi Anggaran		
		Target	Realisasi	Satuan	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Layanan Perkantoran	1	1	Layanan	100	11.316.518.000	11.161.215.586	98,63
2	Layanan Sarana Internal	54	54	Layanan	100	392.313.000	390.699.912	99,59
3	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jambi	22	22	LHP	100	3.429.276.000	3.337.030.629	97,31
4	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi	120	120	LHP	100	263.141.000	263.134.800	99,99
5	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	1	1	LHP	100	589.443.000	588.402.830	99,82
6	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1	1	Rumusan	100	8.480.000	8.468.000	99,86
7	Sumbangan IHPS Perwakilan	2	2	Sumbangan IHPS	100	4.569.000	4.507.200	98,64
8	Laporan Profil Entitas Perwakilan	12	12	Laporan	100	11.996.000	11.989.500	99,94
9	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jambi	24	24	Laporan	100	256.000.000	254.318.000	99,34
10	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Jambi	24	24	Laporan	100	234.100.000	233.307.750	99,66
11	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jambi	21	21	LHP	100	2.411.906.000	2.411.899.799	99,99
12	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	12	12	Laporan	100	321.335.000	314.319.530	97,81
13	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	21	21	Laporan	100	1.491.211.000	1.488.215.194	99,80
<b>Total</b>		<b>315</b>	<b>315</b>		<b>100</b>	<b>20.730.288.000</b>	<b>20.467.508.730</b>	<b>98,73</b>

Tabel 32. Jenis keluaran, volume keluaran, dan realisasi anggaran RKA BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2021

### 1. Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah merealisasikan 1 keluaran/output layanan dengan anggaran sebesar Rp11.316.518.000,00 dan realisasi sebesar Rp11.161.215.586,00 atau sebesar 98,63% yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- 1.1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan.

Pembayaran Gaji dan Tunjangan pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan anggaran Rp5.884.652.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.770.713.836,00 atau sebesar 98,06%.
- 1.2. Layanan Perkantoran Bidang Tata Usaha Kepala Perwakilan  
Layanan Perkantoran Bidang Tata Usaha Kepala Perwakilan pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan anggaran Rp240.928.000,00 dan realisasi sebesar Rp239.752.200,00 atau sebesar 99,51%.
- 1.3. Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan  
Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan anggaran Rp38.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp38.400.000,00 atau sebesar 100%.
- 1.4. Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia  
Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan anggaran Rp612.818.000,00 dan realisasi sebesar Rp612.517.927,00 atau sebesar 99,95%.
- 1.5. Layanan Perkantoran Bidang Keuangan  
Layanan Perkantoran Bidang Keuangan pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan anggaran Rp274.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp274.200.000,00 atau sebesar 100%.
- 1.6. Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI  
Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan anggaran Rp4.292.520.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.252.631.623,00 atau sebesar 99,07%.
2. Layanan Sarana Internal  
Layanan Sarana Internal pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah merealisasikan 54 keluaran/output layanan dengan anggaran sebesar Rp392.313.000,00 dan realisasi sebesar Rp390.699.912,00 atau sebesar 99,59%.
3. LHP BPK Perwakilan Provinsi Jambi  
BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menghasilkan 22 keluaran/output LHP BPK Provinsi Provinsi Jambi dengan anggaran sebesar Rp3.429.276.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.337.030.629,00 atau sebesar 97,31%.

Pemeriksaan terinci yang dilaksanakan pada semester I tahun 2021 terdiri dari pemeriksaan terinci atas LKPD TA 2020 pada 12 entitas di wilayah Provinsi Jambi dan satu pemeriksaan terinci kinerja atas Penyelenggaraan dan Pelayanan SAMSAT. Dari 12 entitas tersebut, 11 entitas mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan satu entitas mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pemeriksaan terinci yang dilaksanakan pada semester II tahun 2021 terdiri dari tujuh pemeriksaan kinerja dan tiga pemeriksaan DTT.

4. LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi  
BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menghasilkan 120 keluaran/output LHP dari total target keluaran sebanyak 120 LHP atas Banparpol atas BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan anggaran sebesar Rp263.141.000,00 dan realisasi sebesar Rp263.134.800,00 atau sebesar 99,99%.
5. LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan  
BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menghasilkan 1 keluaran/output LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK dengan anggaran sebesar Rp589.443.000,00 dan realisasi sebesar Rp588.402.830,00 atau sebesar 99,82%.
6. Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan  
Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menghasilkan 1 keluaran/output Rumusan Bahan Pendapat dengan anggaran sebesar Rp8.480.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.468.000,00 atau sebesar 99,86%.
7. Sumbangan IHPS Perwakilan  
BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menghasilkan 2 keluaran/output sumbangan IHPS dengan anggaran sebesar Rp4.569.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.507.200,00 atau sebesar 98,64%.
8. Laporan Profil Entitas Perwakilan  
BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menghasilkan 12 keluaran/output laporan profil entitas dengan anggaran sebesar Rp11.996.000,00 dan realisasi sebesar Rp11.989.500,00 atau sebesar 99,94%.
9. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jambi  
BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menghasilkan 24 keluaran/output Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jambi

dengan anggaran sebesar Rp256.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp254.318.000,00 atau sebesar 99,34%.

10. Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Jambi

BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menghasilkan 24 keluaran/output Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan anggaran sebesar Rp234.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp233.307.750,00 atau sebesar 99,66%.

11. LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jambi

BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menghasilkan 21 keluaran/output Laporan Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan anggaran sebesar Rp2.411.906.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.411.899.799,00 atau sebesar 99,99%.

12. Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menghasilkan 12 keluaran/output Laporan Manajemen Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan anggaran sebesar Rp321.335.000,00 dan realisasi sebesar Rp314.319.530,00 atau sebesar 97,81%.

13. Layanan Manajemen Internal Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menghasilkan 12 keluaran/output Laporan Manajemen Internal BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan anggaran sebesar Rp1.491.211.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.488.215.194,00 atau sebesar 99,80%.

### **C. KINERJA LAINNYA**

Selain pencapaian berupa kinerja yang memiliki indikator kinerja yang sudah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jambi juga berhasil meraih Penghargaan sebagai Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penerimaan penghargaan dimaksud dapat menggambarkan bahwa disamping berusaha mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan, pelaksanaan kegiatan juga memperhatikan nilai-nilai integritas dalam pemberian pelayanan publik kepada para pemegang kepentingan.

Penganugerahan penghargaan diberikan sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 10 Desember 2019. Dengan adanya penghargaan tersebut, diharapkan dapat menjadi pendorong bagi Pimpinan dan seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk dapat berprestasi di banyak bidang lainnya.





# **BAB IV PENUTUP**

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2021**

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi merupakan sumbangan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Badan Pemeriksa Keuangan menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis BPK tahun 2020 – 2024. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Perwakilan Provinsi Jambi tahun 2021 merupakan hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas baik di bidang pemeriksaan maupun penunjang/pendukung pemeriksaan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan BPK Perwakilan Provinsi Jambi secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan LAKIN sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja dan *Balanced Scorecard* atau Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan Satuan Kerja.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi akan selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian besar indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik namun terdapat juga indikator yang masih berada di bawah target.

Target Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagian besar tercapai dengan baik. Dari 13 IKU tahun 2021, sebanyak 10 IKU berstatus hijau dan tiga IKU berstatus kuning, serta tidak terdapat IKU yang berstatus merah. Tiga IKU yang belum mencapai target dan perlu mendapat perhatian khusus adalah sebagai berikut.

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
2. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

### 3. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Untuk IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan dengan capaian sebesar 93,85% dari target 100%, BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan berusaha lebih maksimal untuk memastikan tingkat konsistensi isi LHP yang diterbitkan agar kesalahan tahun ini tidak terulang lagi di tahun yang akan datang.

Terhadap IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 70,20% dari target 75%, BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan mengoptimalkan dan mendorong seluruh entitas pemeriksaan untuk melakukan proses penyelesaian TLRHP melalui aplikasi SiPTL yang secara langsung dapat diakses oleh seluruh entitas pemeriksaan, sehingga akan mempercepat penyelesaiannya. Disamping itu juga, BPK Perwakilan Provinsi Jambi membuka forum diskusi yang membahas tentang tindak lanjut rekomendasi bersama dengan entitas.

Untuk IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK yang pada tahun 2020 ini indeks hasil survey nilai 4,50 dari target sebesar 5, pada tahun mendatang BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan menambah kegiatan sosialisasi maupun pengarahan – pengarahan oleh Pimpinan kepada seluruh pegawai, guna mendorong meningkatnya pemahaman dan penghayatan visi, misi dan nilai – nilai dasar BPK baik dalam kehidupan profesionalnya maupun secara personal.

Sedangkan untuk IKU yang telah mencapai maupun melampaui target yang ditetapkan, BPK Perwakilan Jambi akan terus memotivasi diri baik Pimpinan maupun seluruh pegawai untuk selalu berupaya meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Satuan Kerja, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan keputusan dan penetapan kebijakan oleh Pimpinan BPK.